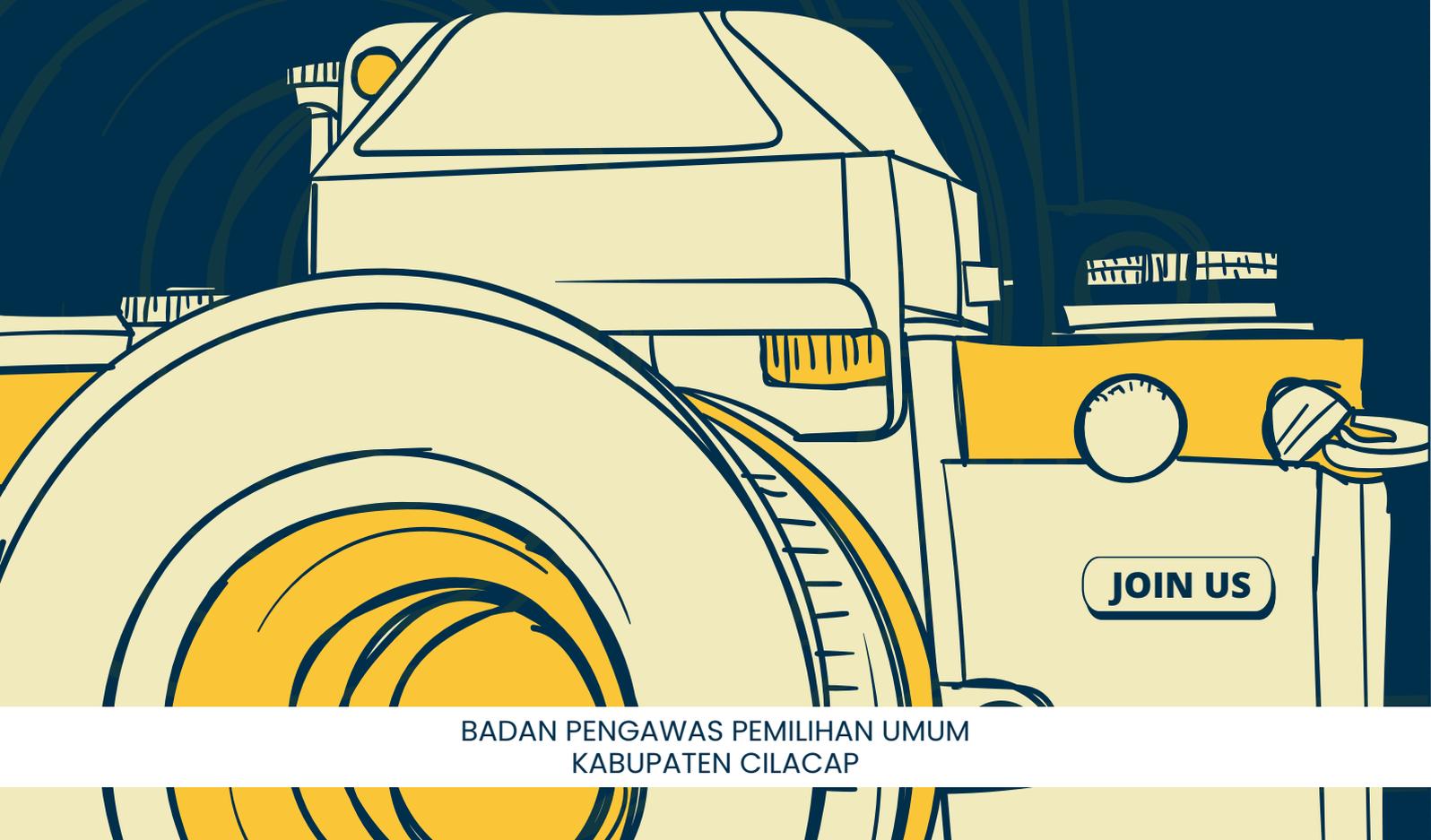


LAPORAN AKHIR **KEHUMASAN**

BAWASLU KABUPATEN CILACAP

TAHUN **2023**



KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan kehumasan terhadap publik maupun tanggung jawab Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagaimana amanah undang-undang pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024 dimulai dari awal tahun 2022. Hal ini membuat Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Cilacap segera menyesuaikan dengan membuat konten edukatif dan kreatif serta memberitakan kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap kepada publik mengenai pengawasan pemilu.

Pada intinya, Laporan Akhir yang disusun ini merupakan cuplikan hasil kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap, khususnya Kehumasan sepanjang tahun 2023 dalam memaparkan hasil pelaksanaan program maupun seluruh kegiatan kehumasan yang dilakukan.

Cilacap, 23 Januari 2024
Bawaslu Kabupaten Cilacap
Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas

Ujang Taufik Nur M

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada awal tahun 2024 mendatang. Kendati demikian, sejumlah tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat. Pemilu adalah sarana demokrasi dalam rangka memilih presiden wakil presiden, anggota DPR, DPD dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2024 mendatang, selain melaksanakan Pemilu secara nasional, Kabupaten Cilacap juga akan kembali melaksanakan kedaulatan rakyat dengan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di akhir tahun 2024.

Berkenaan dengan adanya Pemilu dan Pemilihan Serentak pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Cilacap serta penyelenggara Pemilu sejauh ini telah berupaya agar pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dilaksanakan secara baik. Berbagai persiapan juga telah dilakukan bagi memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cilacap sejauh ini juga telah melakukan serangkaian persiapan. Persiapan yang dilakukan tersebut diantaranya melakukan Rapat Koordinasi, dan juga melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan sejumlah perencanaan dan strategis pengawasan serta upaya-upaya pencegahan bagi mengatasi potensi-potensi kerawanan yang muncul, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan terganggunya tahapan penyelenggaraan.

Dalam hal penguatan kapasitas internal, jajaran pengawas Pemilu telah melakukan beberapa Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis guna membahas terkait dengan standar pengawasan dalam bentuk alat kerja pengawasan yang telah dirumuskan oleh Bawaslu RI. Beberapa isu krusial yang kemudian menjadi fokus pengawasan, yaitu Kepatuhan prosedur Penyelenggara pada saat tahapan

pemutakhiran data pemilih, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten Cilacap,

Disamping itu, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga melakukan sosialisasi dan pengawasan partisipatif bagi mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pemilu. Termasuk pula membangun pola komunikasi dan hubungan antar lembaga yang ada di Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan terhindar dari pelanggaran yang terjadi didalamnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan	4
C. Landasan Hukum.....	5
D. Sistematika Laporan.....	5
BAB II.....	7
KEBIJAKAN KEHUMASAN	7
A. SARANA DAN PRASARAN	7
B. SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
C. MONITORING DAN EVALUASI	9
D. PENINGKATAN KAPASITAS	10
E. ANGGARAN	11
BAB III PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN	15
A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL	15
B. PENGELOLAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE.....	18
BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN	20
A. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	20
B. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA	25
BAB V PENUTUP	27
A. KESIMPULAN	27
B. SARAN	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sarana dan Prasarana Kehumasan Bawaslu Cilacap	7
Tabel 2 Capaian Output Kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap.	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peningkatan Kapasitas Pelatihan Pemberitaan dan Pembuatan Konten Video	10
Gambar 2 Tampilan Instagram Bawaslu Kabupaten Cilacap	15
Gambar 3 Tampilan Insight Instagram Bawaslu Kabupaten Cilacap.	16
Gambar 4 Tampilan Youtube Bawaslu Kabupaten Cilacap	17
Gambar 5 Tampilan Facebook Bawaslu Kabupaten Cilacap	17
Gambar 6 Grafik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Cilacap	19
Gambar 7 Tampilan Website Bawaslu Cilacap.....	19
Gambar 8 Patroli Pengawasan Hak Pilih	21
Gambar 9 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja	22
Gambar 10 Sosialisasi Kelompok Disabilitas	22
Gambar 11 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	24
Gambar 12 Dialog Kesiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024	24
Gambar 13 Diskusi Publik bersama Gen Z di Unugha Cilacap.	25
Gambar 14 Rapat koordinasi Kehumasan dengan Panwaslu Kecamatan dan Media	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sesuai dengan Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum terdapat koordinator divisi yang membidangi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Bidang humas memiliki peran dalam melakukan dokumentasi dan publikasi kinerja Bawaslu melalui konten kreatif. Semua bidang tersebut menjadi tugas, pokok, dan fungsi yang dilaksanakan dalam mendukung kinerja pengawasan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022 Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. Pada Perbawaslu tersebut menjelaskan bahwa Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf b angka 2 mengoordinasikan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat serta hubungan antarlembaga;
- b. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- c. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- d. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- e. pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;

- f. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- h. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga;
- i. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
- j. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
- k. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
- l. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
- m. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
- n. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.

Secara umum Humas adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Humas dapat mencakup sebuah organisasi atau individu yang menggunakan topik kepentingan public dan berita. Kegiatan umum termasuk berbicara di konferensi pers, memenangkan penghargaan, kerjasama pers dan komunikasi internal

eksternal. Sebagai profesi Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi. Menurut Howard Bohham Humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian public, serta untuk meningkatkan kepercayaan public atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap sebuah organisasi atau lembaga.

Humas sebagai bagian Penyiapan, Perencanaan dan Penyelenggaraan Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Pengawasan Pemilu dan Kepemiluan memiliki fungsi Publikasi yang informatif, edukatif serta impresi. Publikasi yang dilakukan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang diharapkan dapat memberikan informasi terkait Bawaslu, Pemilu, Pengawasan Pemilu sehingga kerja Kehumasan bisa menjadi pusat pengetahuan publik mengenai Pemilu dan Pengawasan Pemilu selain dari pada itu publikasi yang dilakukan kehumasan diharapkan mampu memberi pengaruh ataupun efek terhadap semakin masifnya Pengawas Partisipatif.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang memiliki fungsi yaitu:

1. Penyiapan perencanaan kegiatan penyelenggaraan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi;
2. Penyiapan bahan informasi sosialisasi pengawasan Pemilu dan Kepemiluan;
3. Penyelenggaraan Pemberitaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan pengawas Pemilu dan Kepemiluan.

Sesuai dengan Visi Bawaslu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis dan Terpercaya” maka Humas memiliki peranan penting sebagai upaya untuk membangun citra Bawaslu. Memperkuat dan menjaga eksistensi serta membangun persepsi positif public terhadap Bawaslu. Semua bentuk

komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar. Adalah sebagai upaya untuk menciptakan citra positif Bawaslu dimata publik melalui hubungan baik di internal Bawaslu maupun antar lembaga yang sudah pasti sangat membantu dalam upaya menjaga eksistensi Bawaslu.

Humas sebagai upaya untuk menciptakan pengertian *public* yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan *public* terhadap Bawaslu. Kegiatan Humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam symbol komunikasi, verbal maupun nonverbal.

Selain daripada beberapa hal diatas SDM Kehumasan juga harus menjadi perhatian khusus oleh internal Bawaslu pembinaan keterampilan dan pengetahuan secara berkala menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan karena kinerja Bawaslu secara keseluruhan akan dilihat dan direspon masyarakat melalui pengelolaan Publikasi yang dilakukan oleh Kehumasan. Sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024, Pada Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Rembang focus Pengawasan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan dan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rembang, maka penyenggaraan pemberitaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pengawasan dan Kepemiluan sangat terbatas, kemudian sebagai upaya menjaga eksistensi Bawaslu di Public Bawaslu Rembang aktif melakukan Publikasi berbagai kegiatan internal Bawaslu di social Media Bawaslu Kabupaten Cilacap.

B. Tujuan Laporan

Tujuan Penulisan Laporan Akhir Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Kehumasan, Evaluasi pelaksanaan tugas, Identifikasi Capaian, uraian terkait tantangan dan peluang Kehumasan Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2023 terhadap tercapainya Visi dan Misi Bawaslu serta rencana kerja Humas Bawaslu Cilacap Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

D. Sistematika Laporan

Adapun Sistematika Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum: Isi dari subbab ini adalah Ringkasan pelaksanaan fungsi dan program Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota selama tahun 2023;
- B. Tujuan Laporan: Isi dari subbab ini berisi tentang tujuan Laporan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2023;
- C. Landasan Hukum: Isi dari sub bab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.
- D. Sistematika Laporan: Isi dari sub bab ini memaparkan kerangka penyajian laporan.

2. BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN

- A. Sarana dan Prasarana
- B. Sumber Daya Manusia
- C. Monitoring dan Evaluasi
- D. Peningkatan Kapasitas
- E. Anggaran

3. BAB III PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN

- A. Pengelolaan Publikasi Melalui Media Sosial
 - B. Pengelolaan Pemberitaan Melalui Website
4. BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN
- A. Pengelolaan Hubungan Masyarakat
 - B. Pengelolaan Hubungan dengan Media
5. BAB V PENUTUP
- A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi

BAB II

KEBIJAKAN KEHUMASAN

A. SARANA DAN PRASARAN

Jika sarana diartikan dengan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana diartikan dengan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Maka, keberadaan sarana dan prasarana kehumasan adalah sesuatu hal yang mutlak diperlukan keberadaannya dalam mencapai hasil yang baik sesuai dengan perencanaan kerja-kerja kehumasan.

Sarana dan prasarana mempunyai fungsi menciptakan kenyamanan, menciptakan kepuasan, mempercepat proses kerja, memudahkan proses kerja, meningkatkan produktivitas, hasil lebih berkualitas.

Ketiadaan sarana dan prasarana, rencana yang telah disusun akan terancam gagal terwujud. Walaupun ada akan tetapi sarana dan prasarana kurang memadai maka hasilnya pun tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan.

Jumlah sarana yang dimiliki adalah 28 buah. Jumlah prasarana 2 buah. Dari jumlah tersebut masih ada beberapa alat yang kurang dan belum dimiliki oleh Humas Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menunjang pekerjaannya. Peralatan dan hal yang belum dimiliki tersebut diantaranya meliputi mic condenser, web cam, TV Led, kamera dron, action cam, lensa kamera, kamera DSLR, sound card, Video mixer, clip on, Komputer yang khusus untuk desain grafis dan edit video, hardis eksternal.

Tabel 1 Sarana dan Prasarana Kehumasan Bawaslu Cilacap

ALAT	JUMLAH	KONDISI
Kamera DSLR	1	Baik
Handycam	2	Baik
Recorder	1	Baik

ALAT	JUMLAH	KONDISI
Mixer Sound	1	Baik
Tripod	1	Baik
TV LED	1	Baik
Proyektor	1	Baik

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Humas Bawaslu kabupaten Cilacap jauh dari kata ideal. Hal ini dikarenakan jumlah yang kurang memadai dan beban kerja yang tinggi, ditambah lagi mereka berasal dari orang yang bukan ahli dalam bidang kehumasan.

Pun demikian, keberlangsungan humas Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak bergantung pada ketidak idealan itu. Keberlangsungannya memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap SDM yang ada di Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Di tahun 2023 jumlah SDM humas Bawaslu Kabupaten Cilacap hanya ada satu personil dengan dibantu dari staf Data dan Informasi sebagai admin Website Bawaslu Kabupaten Cilacap. Satu personil berhubungan langsung dengan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Dimana didalam Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Kabupaten Cilacap hanya mempunyai satu staf namun didalam pekerjaan seperti mempunyai dua tanggungjawab. Dimana di Provinsi Jawa Tengah ada dua Koordinator Divisi yang membidangi Pencegahan Parmas dan Humas Datin yang berdampak ke beban kinerja di Bawaslu Kabupaten Cilacap. Di Bawaslu Kabupaten Cilacap Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas sebagai Penanggungjawab pada pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dan pengawasan konten internet (Siber).

Nama, tugas dan keahlian staf yang membidangi kehumasan di Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom

Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas sebagai Desain Grafis, Admin Media Sosial dan Dokumentasi.

Selain hanya satu orang staf yang membidangi kehumasan akan tetapi dalam melaksanakan tugas-tugas kehumasan dibantu oleh staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap.

C. MONITORING DAN EVALUASI

Banyak cacatan yang bisa dijadikan bahan evaluasi dalam perjalanan kerja-kerja kehumasan kedepan. Catatan yang pertama adalah SDM kehumasan yang terbatas sedangkan beban kerja yang tidak seimbang dengan jumlah SDM yang dimiliki. Meskipun hal ini bisa ditambal dengan memfungsikan staf yang lain akan tetapi staf yang lain itu juga mempunyai beban tanggungjawab yang lain sesuai dengan divisinya masing masing. Hal ini akan berimbas kurang maksimalnya pelaksanaan tugas kehumasan yang diberikan. Melihat kondisi yang demikian, penambahan SDM kehumasan menjadi solusi yang akan memperbaiki kerjakerja kehumasan kedepan.

Catatan yang kedua adalah kemampuan SDM Humas Bawaslu Kabupaten Cilacap masih jauh dari kebutuhan yang diperlukan. Keahlian yang dibutuhkan adalah tentang menulis berita, mengelola website dan medsos, video editing, desain grafis dan lain-lain. Keahlian tersebut adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kerja-kerja kehumasan saat ini. Sehingga peningkatan kapasitas dengan membekali mereka keahlian tersebut di atas adalah hal yang mutlak dan harus diberikan.

Catatan yang ketiga adalah kurangnya perencanaan sehingga hasil kinerja kehumasan tidak maksimal. Sehingga perlu adanya perencanaan dalam kerja-kerja kehumasan itu sendiri atau sebagai fasilitator dari divisi yang lain dengan cara mensinkronkan dengan program divisi yang lain agar tidak tumpang tindih.

Catatan yang keempat adalah kurangnya sarana dan prasarana kehumasan yang dibutuhkan, sehingga perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan kehumasan agar bisa maksimal.

Catatan yang kelima adalah kurangnya dukungan anggaran juga berpengaruh pada kinerja kehumasan, sehingga perlu diupayakan penambahan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas kehumasan atau menjalankan tugas kehumasan itu sendiri.

D. PENINGKATAN KAPASITAS

Sebagai upaya peningkatan kapasitas Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi staf Bawaslu Kabupaten Cilacap yang meliputi pelatihan pemberitaan dan pembuatan konten video. Dalam peningkatan kapasitas kehumasan ini mengundang narasumber dari Suara Merdeka atas nama Gayul Dika Wicaksono. Tujuan dari peningkatan kapasitas ini untuk meningkatkan kemampuan kepada staf Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam pembuatan pemberitaan dan pembuatan konten video sehingga kualitas pemberitaan dan konten video yang diproduksi semakin bagus.



Gambar 1 Peningkatan Kapasitas Pelatihan Pemberitaan dan Pembuatan Konten Video

E. ANGGARAN

Anggaran kehumasan di Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 37.660.000,-.

Tabel 2 Capaian Output Kegiatan Bawaslu Kabupaten Cilacap.

No	Nama Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Output
1	Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Sabtu, 4 Februari 2023	Memahami Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada jajaran Panwaslu Kecamatan serta mempraktekan cara pengisian Alat Kerja Pengawasan.
2	Siaga Pengawasan "Satu Tahun Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024"	Stakeholder, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Kelompok Disabilitas, Organisasi Perempuan dan Pemantau Pemilu.	14 Februari 2023	Mengajak seluruh komponen Masyarakat di Kabupaten Cilacap untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas melalui Deklarasi Pemilu Damai. Penguatan dan sinergitas aspek pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat kepada stakeholder terkait
3	Rapat Kerja Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilu Tahun 2024	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Jum'at, 17 Februari 2023	1. Panwaslu memahami terkait dengan SE Bawaslu RI Nomor 15 perihal penyesuaian Alat Kerja Pengawasan, dimana Panwaslu Kecamatan juga menyampaikan hasil dari Rapat Kerja ini kepada Panwaslu Kelurahan/Desa; 2. Panwaslu Kecamatan dapat menyampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terkait dengan alat kerja

No	Nama Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Output
				<p>pengawasan uji petik yang menggunakan model google form.</p> <p>3. Memahami terkait dengan jenis-jenis identifikasi dalam melakukan uji petik yang nantinya akan disampaikan didalam bimtek bersama Panwaslu Kelurahan/Desa.</p>
4	Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang	Pemerintah Desa Karanggedan g BPD Desa Karanggedan g Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Kelompok Perempuan Kelompok Kepemudaan	18 Maret 2023	Mensosialisasikan tentang bahaya Politik Uang sehingga Masyarakat diharapkan bisa ikut berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran pemilu tahun 2024.
5	Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas	NPCI Kabupaten Cilacap	19 Maret 2023	Memasifkan pengawasan pemilih partisipatif terhadap kelompok disabilitas di Kabupaten Cilacap
6	Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan dan Persiapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Selasa, 21 Maret 2023	Mengevaluasi pengawasan melekat dan uji petik pada tahapan coklit yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Memahami proses Rekapitulasi dan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tiap tingkatan; Memahami Surat Keputusan KPU Nomor 27

No	Nama Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Output
				Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7	Rapat Kerja Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih Tetap Berkelanjutan	KPU Kabupaten Cilacap dan Disdukcapil Kabupaten Cilacap	29 Maret 2023	Mendapatkan data hasil perawatan dari DPT Pemilu 2019 sehingga bisa digunakan oleh jajaran Bawaslu Cilacap dalam melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih.
8	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 “Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024”	Ketua Panwaslu Kecamatan dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Selasa, 4 April 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan jajaran Pengawas di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP di masing tingkatan; 2. Menyampaikan Alat Kerja Pengawasan Form A1.DP-2 dan Form A1.DP-5; 3. Persiapan pengawasan penyusunan DPHP dan Penetapan DPS di tingkat Kabupaten/Kota;
9	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 “Persiapan Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024”	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Sabtu, 17 Juni 2023	Menyampaikan Alat Kerja Pengawasan A1.DP-7 Panwaslu Kecamatan hasil pencermatan setelah pleno DPSHP Akhir tingkat Kecamatan; Persiapan pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024;

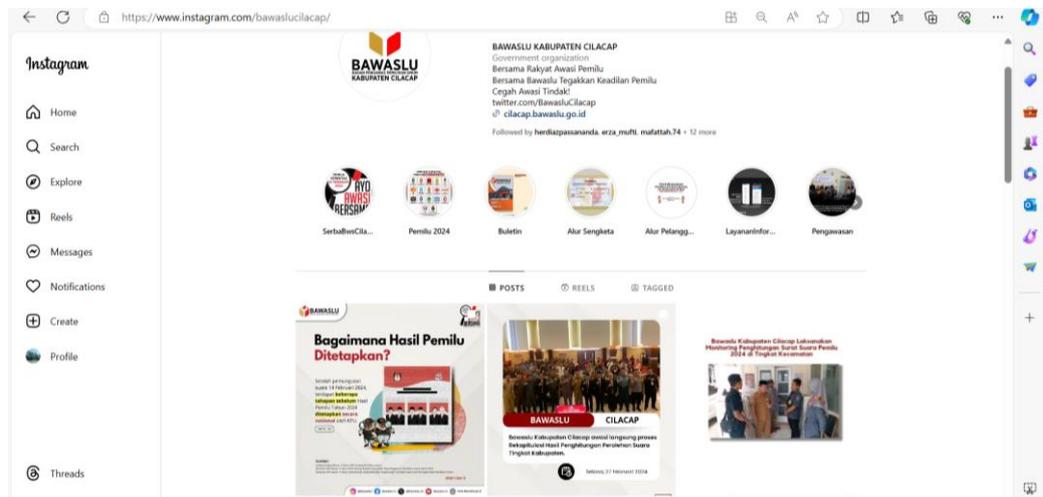
No	Nama Kegiatan	Peserta	Tanggal Pelaksanaan	Output
10	Webinar Pojok Pengawasan dengan tema "Mengawal Hak Pilih Pemilu Tahun 2024"	Masyarakat di Kabupaten Cilacap	23 September 2023	Memberikan pemahaman kepada Masyarakat pentingnya menjaga hak pilih secara Bersama agar pemilu 2024 bisa berjalan dan sukses sehingga terwujudnya pemilu yang Luber dan Jurdil.
11	Rapat Kerja Teknis Pencegahan dan Laporan DPTb dan DPK Pemilu 2024	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Selasa, 24 Oktober 2023	Panwaslu Kecamatan memahami bentuk-bentuk pencegahan pada tahapan penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024.
12	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan Tema Konsolidasi Pencegahan dan Sosialisasi Form Pencegahan Online	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Rabu, 13 Desember 2023	Memberikan bimbingan Teknis ke Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan cara menggunakan Aplikasi Form Pencegahan Online sehingga bisa melakukan unggah dokumen secara mandiri kedalam aplikasi.
13	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan Tema "Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK Pada Pemilu 2024".	Panwaslu Kecamatan dan Staf Panwaslu Kecamatan	Sabtu, 23 Desember 2023	Mengevaluasi hasil kinerja Panwaslu Kecamatan divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas terhadap pengawasan penyusunan DPTb dan DPK Pemilu Tahun 2024.
14	Rapat Evaluasi Pengawasan dengan tema "Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK pada Pemilu Tahun 2024"	KPU Kabupaten Cilacap dan Disdukcapil Kabupaten Cilacap	27 Desember 2023	Mengevaluasi hasil kinerja Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada sub tahapan penyusunan DPTb dan DPK Pemilu 2024 serta memberikan masukan dari Disdukcapil terkait dengan jumlah warga yang melakukan pindah memilih

BAB III PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN

A. PENGELOLAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL

Pengelolaan media sosial yang baik melakukan komunikasi dan interaksi yang baik dengan publik, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Cilacap mengelola publikasi dengan berbagai wadah diantaranya dengan media sosial yaitu Instagram. Instagram merupakan tren bagi kalangan muda sehingga Bawaslu Kabupaten Cilacap menggunakan media sebagai sarana publikasi dan interaksi kepada masyarakat.

Di dalam instagram memberikan kemudahan selain penggunaan yang tanpa bayar ini memberikan jenis variasi yang diunggah yaitu berupa Foto, video, interaksi melalui *Direct Message*, kolom komentar dan baru-baru ini juga dimunculkan oleh pihak instagram yaitu berupa video reels. Akun resmi instagram Bawaslu Kabupaten Cilacap yaitu @bawaslucilacap dengan jumlah pengikut sampai akhir tahun 2023 yaitu 1.433 . Untuk jumlah postingan ditahun 2023 yaitu 417 postingan.



Gambar 2 Tampilan Instagram Bawaslu Kabupaten Cilacap

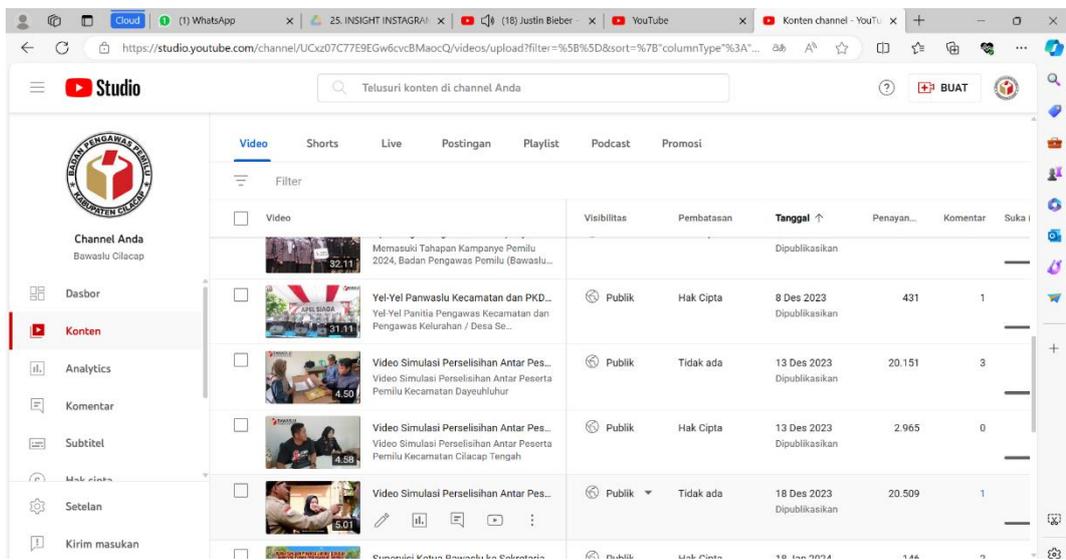


Gambar 3 Tampilan Insight Instagram Bawaslu Kabupaten Cilacap.

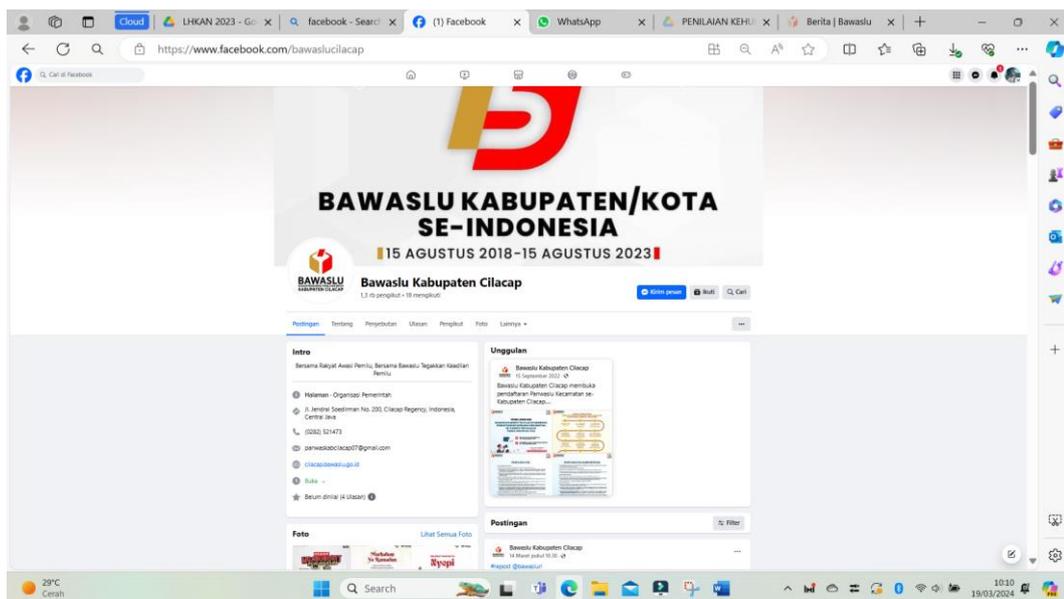
Selain Instagram Bawaslu Kabupaten Cilacap juga menggunakan platform Youtube dalam pengelolaan media sosial. Akun Youtube Bawaslu Kabupaten Cilacap @bawaslucilacap dengan jumlah postingan 24 Video selama tahun 2023. Penayangan terbanyak 20.509 yaitu pada Video Simulasi Perselisihan Antar Peserta Pemilu Kecamatan Dayeuhluhur. Melalui kanal Youtube interaksi ada kolom komentar untuk komunikasi dengan publik.

Selain Youtube dan Instagram juga menggunakan media sosial Facebook dengan terintegrasi dengan media sosial Instagram. Facebook masih tetap digunakan dikarenakan pengguna media sosial facebook ada berbagai kalangan.

Sistem pengelolaan Facebook masuk dalam tatakelola organisasi pemerintahan sehingga bukan berupa personal namun publik. Akun facebook Bawaslu Kabupaten Cilacap yaitu @Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan jumlah pengikut 1.3 ribu.



Gambar 4 Tampilan Youtube Bawaslu Kabupaten Cilacap



Gambar 5 Tampilan Facebook Bawaslu Kabupaten Cilacap

B. PENGELOLAAN PEMBERITAAN MELALUI WEBSITE

<https://cilacap.bawaslu.go.id> merupakan website umum dan website kehumasan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Di web ini terdapat informasi-informasi, Berita, Putusan Pelanggaran, Publikasi Pojok Baca. Publik atau masyarakat dengan mencari kata kunci Bawaslu Kabupaten Cilacap di halaman pencarian sehingga aktifitas dan informasi dari lembaga bisa diakses oleh masyarakat yang ingin mengakses dan mencari tahu informasi Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan kata lain Website merupakan wajah lembaga di dunia maya.

Penggunaan website ini sebagai sarana informasi di era keterbukaan informasi publik, memudahkan publik atau masyarakat dalam pencarian informasi kelembagaan. Harapannya dengan adanya website Selain itu website sebagai alat branding Bawaslu Kabupaten Cilacap agar masyarakat lebih banyak berpartisipasi dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Pada pengelolaan website ini ada dua staf yakni staf teknis dari Divisi Pencegahan. Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan Staf Teknis Data Informasi yang membidangi Informasi layanan Publik.

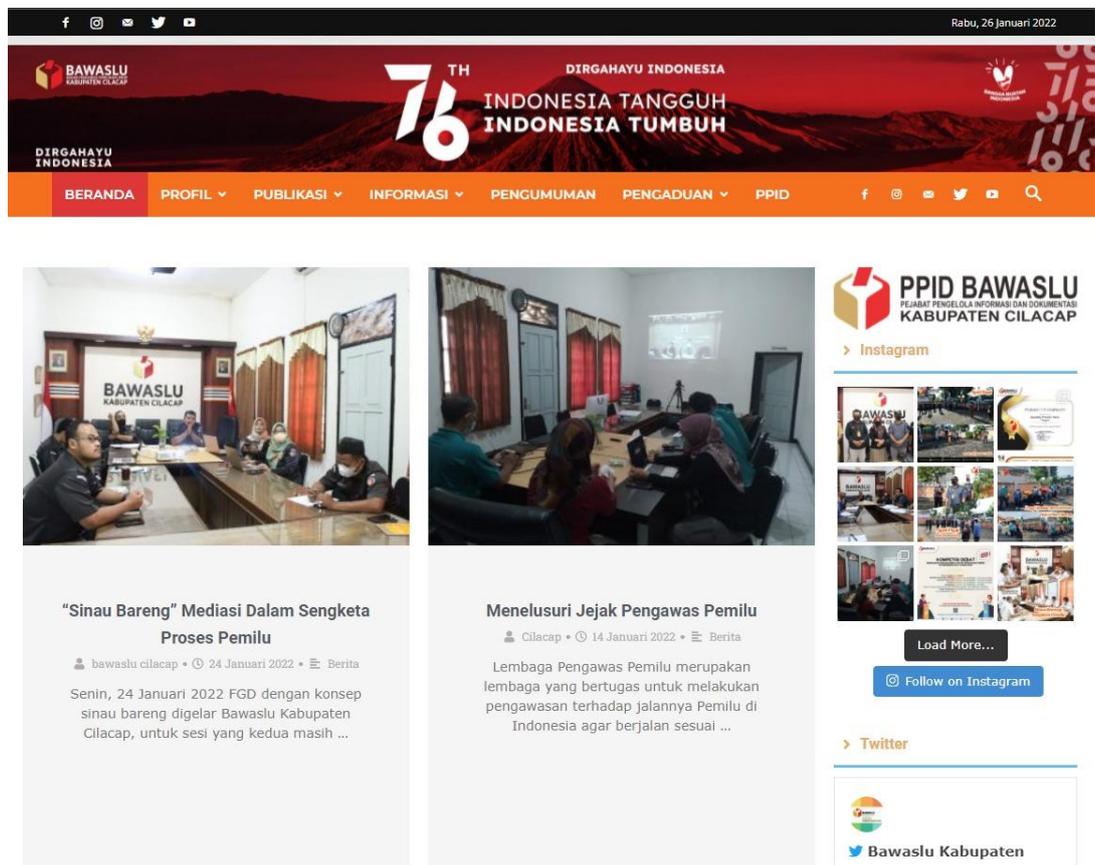
Pembuatan berita mengangkat topik yang bersumber dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap seperti kegiatan sosialisasi partisipasi masyarakat, rekrutmen badan adhoc, rapat koordinasi dengan pengawas adhoc, dan tahapan pengawasan pemilu.

Pemberitaan dikelola oleh dua staf yang bersumber dari masing-masing divisi, setiap staf divisi mengumpulkan dari kegiatan masing-masing divisi, untuk editor terakhir ada di staf kehumasan. Selama tahun 2023 ada 61 berita yang diposting.

Selain pemberitaan di dalam website juga sudah terkelola jumlah pengunjung setiap tahunnya. Pada tahun 2023 pengunjung website mencapai 12.429.



Gambar 6 Grafik Pengunjung Website Bawaslu Kabupaten Cilacap



Gambar 7 Tampilan Website Bawaslu Cilacap

BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Hubungan Masyarakat disebuah organisasi pemerintah merupakan peran penting menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan masyarakat, karena peran hubungan masyarakat ini berpengaruh pada citra lembaga termasuk lembaga dibidang Pengawasan Pemilu. Pengelolaan hubungan masyarakat ini merupakan dikelola dengan strategi-strategi agar peran aktif masyarakat yang dibangun dan ada kolaborasi.

Untuk mencapai hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Cilacap menjalin hubungan dengan para pemangku wilayah yang ada di Kabupaten Cilacap, apalagi di Tahun 2023 merupakan tahun tahapan Pemilu 2024. Langkah awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap yakni dengan menggunakan Media Sosial dengan cara mensosialisasikan program ataupun pencegahan pelanggaran Pemilu 2024. Langkah awal melalui teknologi informasi ini yakni media sosial mengenalkan kepada publik bahwa Bawaslu Kabupaten Cilacap menjalankan tugas sesuai peraturan dan mengajak masyarakat ikut peran aktif dalam partisipasi mengawal tahapan pengawasan pemilu 2024.

Selain program di atas untuk mengajak masyarakat dapat berperan aktif dalam hal meningkatkan Hubungan Masyarakat menjaga citra lembaga sekaligus dalam hal pengawasan Bawaslu Kabupaten menyelenggarakan sosialisasi, publikasi diantaranya yaitu:

1. Patroli Pengawasan Hak Pilih yang dilakukan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas pada tanggal 12 Maret 2023 dengan Kelompok PKK di Kelurahan Tritih Kulon Cilacap Utara, kegiatan ini bertujuan mengajak masyarakat untuk selalu aware terhadap hak pilihnya telah terdaftar;



Gambar 8 Patroli Pengawasan Hak Pilih

2. Bawaslu Kabupaten Cilacap menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang di Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja pada tanggal 18 Maret 2023, tujuan dari kegiatan ini Terbentuknya jaringan Pengawas Partisipatif di Desa Karanggedang; Masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif dalam ikut mencegah, mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu maupun pilkada kepada jajaran Pengawas pemilu; Meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Karanggedang akan bahaya politik uang;



Gambar 9 Kegiatan Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang Desa Karanggedang Kecamatan Sidareja

3. Sosialisasi Kelompok Sasaran Disabilitas pada tanggal 19 Maret 2023, mengajak dari kelompok rentan Para pemilih disabilitas memahami tahapan pemilu yang sudah, sedang dan akan berjalan. Memastikan pemilih disabilitas terdaftar di daftar pemilih pemilu tahun 2024 Mengakomodir masukan dari teman-teman pemilih penyandang disabilitas;



Gambar 10 Sosialisasi Kelompok Disabilitas

4. Pada tanggal 28 Maret 2023 Dialog Bercahaya Bawaslu dan Bercahaya FM dengan Tema "Hasil Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih pada Pemilu 2024;
5. Kegiatan Talkshow Bersama Bawaslu Kabupaten Cilacap yang disiarkan langsung di Radio Wijaya Cilacap 102.6 FM dengan tema Hasil Pengawasan Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab Kota pada Pemilu 2024 pada tanggal 30 Maret 2023;
6. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema Peran Strategis Komunitas Pingpong dalam mengawal Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 29 April 2023 bertujuan Mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas; Sebagai upaya memberikan gambaran serta pendidikan berdemokrasi bagi Komunitas Pingpong Cilacap; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal dan mengawasi proses pemilu 2024;
7. Publikasi Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan Di Kabupaten Cilacap Pada Pemilu Serentak 2024 di Yes Radio Cilacap pada tanggal 8 Mei 2023;
8. Kebangsaan yang diselenggarakan oleh PK IMM STIE Muhammadiyah Cilacap pada tanggal 24 Juni 2023;
9. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat Tentang Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dengan tema menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 25 Juli 2023;
10. Pada tanggal 25 juli 2023 Bawaslu Kabupaten Cilacap menjadi Narasumber pada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat pendidikan politik bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Binangun, dalam kegiatan ini sekaligus mensosialisasikan dalam hal peran aktif pemilih pemula dalam pemilu 2024;

11. Bawaslu Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan karnaval pembangunan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif pada kegiatan karnaval pembangunan Kabupaten Cilacap pada tanggal 22 Agustus 2023 tujuan dari sosialisasi ini memberikan sosialisasi terhadap publik yang sedang menyaksikan karnaval pembangunan;



Gambar 11 Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif

12. Publikasi di Radio tentang Dialog Kesiapan Tahapan Pemilu 2024 pada tanggal 07 November 2023;



Gambar 12 Dialog Kesiapan Pengawasan Tahapan Pemilu 2024

13. Bawaslu Kabupaten Cilacap Narasumber dalam diskusi publik dengan tema Pemilu 2024 di Mata Gen Z di Bem Unugha Cilacap, karena pada kesempatan ini mahasiswa yang akan mengikuti pemilu 2024 termasuk Gen Z;



Gambar 13 Diskusi Publik bersama Gen Z di Unugha Cilacap.

B. PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN MEDIA

Hubungan Masyarakat selain kepada stakeholder , media sosial dan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Cilacap membangun hubungan juga dengan media, dengan menyelenggarakan kegiatan bersama pada tanggal 12 Desember 2023 Rapat Koordinasi Kehumasan dengan Panwascam dan Media dengan tema Peran Kehumasan Dalam Mewujudkan Kepercayaan Publik Terhadap Bawaslu Kegiatan dihadiri Ketua Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Cilacap dan Media. Hadir Sebagai Narasumber Ketua PWI Kabupaten Cilacap Gayhul Dhika Wicaksana dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Cilacap Akhmad Faozan.



Gambar 14 Rapat koordinasi Kehumasan dengan Panwaslu Kecamatan dan Media

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Cilacap , melalui fungsi kehumasan yang dimiliki, berupaya menjalin hubungan yang lebih dekat kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Kehumasan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Cilacap untuk mengoptimalkan pengawasan Pemilu dan sosialisasi terhadap masyarakat agar ada peran aktif masyarakat terhadap tahapan pengawasan Pemilu.

Dari perkembangan teknologi informasi yang sudah ada membantu memudahkan kehumasan Bawaslu Kabupaten Cilacap seperti media sosial, website sebagai citra lembaga di dunia internet sehingga masyarakat juga mengetahui kegiatan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Selain itu memberikan informasi-informasi yang bisa diakses terhadap publik.

Strategi Hubungan Masyarakat ini berpengaruh terhadap kepercayaan terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten Cilacap, dari pengikut media sosial serta peran aktif masyarakat saat kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Cilacap secara tatap muka.

B. SARAN

Pengelolaan Humas di Bawaslu Kabupaten Cilacap masih banyak yang harus ditingkatkan, maka perlu dilakukan:

1. Perencanaan dan Anggaran Kehumasan yang optimal ;
2. Peningkatan Kapasitas di Sumber Daya Manusia Kehumasan;
3. Regulasi dan SOP Pengelolaan Kehumasan;
4. Ada khusus pengelola kehumasan sendiri diluar pengawasan karena selama ini masih ada beban dari pengelola kehumasan, tidak hanya kehumasan tetapi juga pencegahan, sekaligus pengawasan.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

